

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Surabaya Barat dengan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Andi Rahman, Nurul Fadhilah, Nur Ika Mauliyah

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia
Email: nurikamauliyah@uinkhas.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 21, 2025

Revised Maret 25, 2025

Accepted Maret 25, 2025

DOI.10.61930/jurnaladm/v3n1

Kata Kunci

Penagihan Pajak, Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, UPT PPD Surabaya Barat, Sosialisasi, UMKM.

Keywords:

Tax collection, motor vehicles, local revenue, UPT PPD Surabaya Barat, socialization, MSMEs.S



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Andi Rahman, et al,
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Menganalisis upaya penagihan piutang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Barat dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa UPT PPD Surabaya Barat menerapkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi kepada wajib pajak, pengawasan langsung, dan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Program-program unggulan seperti Samsat Drive Thru dan Payment Point terbukti efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pembayaran pajak. Selain itu, keterlibatan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di kalangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) merupakan kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa upaya penagihan yang terencana dan terorganisir tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan agar UPT PPD Surabaya Barat terus meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

ABSTRACT

To evaluate the UPT PPD's motor vehicle tax receivables collecting operations Increasing tax awareness and compliance also requires active participation in public education, particularly among Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs). West Surabaya's Regional Original Revenue (PAD) receipts are rising. The methods used include data collection through observation, interviews, and documentation studies. The results show that UPT PPD West Surabaya implements various strategies, including socialization to taxpayers, direct supervision, and the use of technology to facilitate the tax payment process. Flagship programs such as Samsat Drive Thru and Payment Point have proven effective in increasing the accessibility of tax payments. In addition, active involvement in providing education to the community, especially among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), is key in increasing tax awareness and compliance. It is concluded that well-planned and organized collection efforts not only increase tax revenue, but also contribute to overall regional economic development. Therefore, it is recommended that UPT PPD Surabaya Barat continue to improve socialization and education programs regarding tax obligations to the community to achieve more optimal results.

Pendahuluan

Rofiah et al., (2024) menyatakan bahwa Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas yang harus dibayarkan

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan semua pajak daerah diatur oleh peraturan daerah, Segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek, objek, tarif, dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah ini.

Melalui sistem Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberi kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagai bagian dari salah satu strategi pemerintah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu cara yang dilakukan oleh setiap daerah untuk mengisi pundi-pundi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satunya. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah merupakan contoh pendapatan asli daerah (Vania, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar pada penerimaan daerah (Wijayanti, 2017). Namun, di Kota Surabaya, khususnya wilayah Surabaya Barat, terdapat permasalahan terkait piutang pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan secara optimal. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat terealisasi secara maksimal. Besarnya piutang Pajak tersebut Salah satunya di akibatkan oleh beberapa hal seperti;

1. Masih banyaknya Kendaraan yang hanya atas nama sedangkan pemilik kendaraan yang sebenarnya memiliki KTP di luar wilayah Surabaya Barat sehingga menyulitkan petugas Dinas Luar untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak.
2. Banyak wajib pajak cenderung mengabaikan kewajibannya, disebabkan berbagai alasan antara lain belum sempat, belum ada uang. Sebagian masyarakat karena kesibukannya masih melimpahkan wewenang pengurusan pengesahan kepada orang lain, sehingga proses interaksi langsung dengan petugas pajak di Samsat Induk dan Samsat Unggulan tidak terjadi.
3. Banyak kendaraan khusus Roda 4 yang dipakai sebagai usaha transportasi di luar Provinsi (Luar Jawa) dengan pembayaran Pajaknya dilakukan waktu bersamaan dengan penggantian STNK (5 Tahunan).

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya strategis dalam penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor. Upaya ini dapat meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem penagihan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan pemberian insentif atau kemudahan dalam penyelesaian kewajiban pajak. Selain itu, inovasi dalam sistem pembayaran pajak, seperti digitalisasi dan integrasi layanan, dapat mendukung percepatan penagihan piutang pajak.

Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat sebagai wajib pajak sangat diperlukan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama di Kota Surabaya barat. Dengan optimalisasi penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Salah satu cara negara mengumpulkan dana untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warganya adalah melalui pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan gambaran bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah prioritas

utama Indonesia. Selain itu, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu, dengan memungut pajak, pemerintah Indonesia terus berupaya mensejahterakan rakyatnya. Pajak kendaraan bermotor, yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, merupakan salah satu pajak yang cukup besar kontribusinya terhadap pertumbuhan penerimaan negara (Mukhilis, 2012).

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pemerintah daerah wajib memungut dan mengadministrasikan pajak daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), uang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan otonomi daerah. Mauliyah et al., (2023) Menyatakan bahwa peningkatan PAD adalah beberapa faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Semakin tinggi total pendapatan daerah, semakin besar otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, PAD berperan sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengelola aliran pendapatan di daerah (Mauliyah, et.al, 2023).

Diantaranya adalah provinsi Jawa Timur, yang dengan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa, merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki sebanding dengan jumlah tersebut. Karena semakin banyak orang di Jawa Timur yang menggunakan kendaraan bermotor, Oleh Karena itu pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saling berkaitan. Oleh karena itu, kenaikan PKB (pajak kendaraan bermotor) akan selalu menghasilkan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

Metode Pengabdian

Meyla et al. (2024) menyatakan bahwa metode ialah suatu cara guna mendapatkan sebuah data dan juga yang mengelompokkan bagaimana sebuah data tersebut bisa didapatkan, mengidentifikasi suatu variabel kemudian menjabarkannya menjadi sub variable. Pada saat kegiatan pencatatan data atau menyatukan keterangan yang mungkin diperlukan.

Teknik pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah strategi yang telah disusun dengan mengambil tindakan spesifik agar bisa mencapai suatu tujuan, Metode berfungsi sebagai panduan yang terorganisir untuk mengatasi masalah atau tantangan dengan cara memaksimalkan potensi atau kesulitan untuk menyelesaikannya sebaik mungkin. Teknik pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di UPT PPD Surabaya Barat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, metodologi deskriptif. Tahapan keterlibatan aktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait digunakan dalam analisis ini. Pendekatan ini dipilih untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan laporan Praktik Pengalaman Lapangan. Sebagai hasilnya, proses pelaksanaan kegiatan direncanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pembekalan

Dalam pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL) yang dilaksanakan di UPT PPD Surabaya Barat, Untuk mengajukan permohonan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di institusi yang sesuai, penulis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Mahasiswa meminta Surat Izin Praktik Pengalaman Lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Dekan FEBI Universitas Islam Negeri Jember Sebagai tanda bahwa kita akan bertugas atau melaksanakan praktik pengalaman lapangan (PPL) di instansi yang dituju, Untuk mendapatkan surat pengantar dari BAPENDA Prov Jatim, mahasiswa dapat menyerahkan berkasnya ke BAKESBANGPOL SURABAYA. UPT PPD Surabaya Barat akan menerima surat pengantar tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di UPT PPD Surabaya Barat di sub bagian administrasi, penagihan, penerimaan, dan penetapan. Tanggung jawab penulis antara lain membantu menyiapkan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTP KB), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NP PKB), dan Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSO PKB). Penulis ditempatkan di sub bagian tata usaha, penagihan, penerimaan dan penetapan, serta pelayanan fiskal di instansi tersebut.

3. Tahap Penilaian dan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Mahasiswa yang melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sub bagian penagihan, penerimaan dan penetapan, administrasi, dan pelayanan fiskal di instansi yang dipilih yaitu UPT PPD Surabaya Barat, dievaluasi pada tahap ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menilai kinerja mahasiswa untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Serta mengurangi tagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tantangan yang di hadai di UPT PPD Surabaya Barat.

4. Lokasi dan waktu Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Mahasiswa berkesempatan mengikuti berbagai macam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan selama kegiatan berlangsung, mengikuti jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi praktik pengalaman lapangan Bertempat di Jl. bumi Indah No. 65 Surabaya, Jawa Timur, yaitu UPT PPD Surabaya Barat yang merupakan tempat penulis melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan ini dilaksanakan selama total waktu 30 hari kerja.

Hasil Dan Ketercapaian

Dalam rangka Untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak, UPT PPD Surabaya Barat melakukan berbagai upaya penagihan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Barat Sbagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas Dinas Luar:

- a) Memberikan pengarahan secara intens kepada semua staf agar dalam melaksanakan Dinas Luar harus lebih cermat terjun langsung bertemu dengan Wajib Pajak, bertatap muka sekaligus memberikan sosialisasi persyaratan pengesahan STNK pembayaran PKB;
- b) Melakukan dinas luar ulang untuk kendaraan yang terlapor pemiliknya berpinkiah alamat, alamat tidak jelas, berstatus rusak atau hilang untuk lebih memberi kejelasan mengenal kepemilikan dan status kendaraan
- c) Melakukan dinas luar untuk menagih ulang terhadap surat- surat perpajakan yang belum lunas, kendaraan plat merah maupun kendaraan plat kuning, utamanya pada perusahaan Jasa transportasi.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Dinas Luar

2. Memberikan pengertian serta mengedukasi terhadap wajib pajak tentang kesadaran tepat waktu membayar pajak melalui berbagai sosialisasi dengan penyebaran brosur, pemasangan spanduk. UPT PPD Surabaya Barat melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi, UPT PPD Surabaya Barat juga melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah dan kecamatan di dalam kota Surabaya Barat sebagai bagian dari program-programnya. Bersamaan dengan inisiatif tersebut, UPT PPD Surabaya Barat juga menggunakan media sosial, media cetak, dan media elektronik untuk melakukan sosialisasi. Upaya ini juga dilakukan di SAMSAT Mojokerto dalam penelitian Yafie Setiawan, Di SAMSAT Mojokerto (Yafie, et.al, 2017).. selain Memberikan pengertian kepada wajib pajak untuk kesadaran membayar pajak, UPT PPD Surabaya Barat juga Mensosialisasikan kemudahan membayar pajak kendaraan secara online melalui indomaret, alfamart, ataupun melalui Link Aja dan Tokopedia dan lain sebagainya.



Gambar 1.2 Pelaksanaan Sosialisasi Di Kelurahan

3. Melakukan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada perusahaan yang mempunyai tunggakan dan menghimbau untuk segera membayar Pajak Kendaraan Bermotornya serta melaporkan Kendaraan Bermotor yang rusak berat dan tidak dapat difungsikan.



Gambar 1.3 Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan

4. Program unggulan di UPT PPD Surabaya Barat

Program unggulan di UPT PPD Surabaya Barat juga konsisten dengan temuan dari pengabdian sebelumnya, khususnya yang dilakukan oleh Minto hadi, Tjahjanulin Domai, dan Taufik Fajrin Irfandy yang dilakukan di SAMSAT Kabupaten Nganjuk (Taufik, et.al, 2017). Berikut program unggulan yang ada di lakukan UPT PPD Surabaya Barat;

a) Samsat Drive Thru

Kantor bersama Samsat Surabaya Barat merupakan tempat dilaksanakannya layanan Pembayaran PKB, Pengesahan STNK, dan SWDKLLJ Samsat Drive Thru. Hal ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran di atas kendaraannya tanpa harus meninggalkan kendaraannya.



Gambar 2.1 Drive Thru Samsat



Gambar 2.2 Drive Thru Citraland

b) Payment Point

Payment Point dapat ditemukan di dalam dan di luar gedung UPT PPD Surabaya Barat seperti Payment Point Giant Rajawali. Dan untuk yang terletak didalam gedung UPT PPD Surabaya Barat adalah Payment Point Bumi indah dan beberapa tempat pelaksanaan lainnya berada di luar gedung UPT PPD Surabaya Barat. Yang mana payment point adalah pelayanan pembayaran PKB, Pengesahan STNK Dan SWDKLLJ.

Gambar 2.3 Payment Point Giant Rajawali
Bumi Indah

Gambar 2.4 Payment Point

c) Samsat Corner

Samsat Corner yang terletak di Pusat perbelanjaan (mall) menjadi tempat pelaksanaan Samsat Corner, dimana juga membuka layanan Pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan SWDKLLJ.



Gambar 2.5 Samsat Corner PTC

d) Samsat Srikandi

Samsat Srikandi adalah Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bisa dilakukan di perusahaan, rumah dengan petugas perempuan (samsat jemput bola), Wajib Pajak dengan cara menghubungi WA Center Samsat Surabaya Barat, apabila diyakini kebenarannya, maka petugas Gender (Perempuan) mendatangi Wajib Pajak dengan mengendarai Sepeda Motor.

Masyarakat dalam membayar pajak tidak harus ke Samsat cukup menghubungi petugas, maka petugas samsat yang akan mendatangi wajib Pajak, menghemat waktu, biaya bagi Wajib Pajak.



Gambar 2.6 Samsat srikandi

6. Pembayaran Online

Wajib pajak dapat menyelesaikan transaksi pembayaran dengan lebih mudah berkat kemampuan pembayaran online UPT PPD Surabaya Barat. memudahkan operasional pembayaran bagi wajib pajak. Berbagai inovasi pembayaran online tersedia bagi wajib pajak. Inovasi pembayaran online tersebut antara lain Gopay, Pos Indonesia, Tokopedia, E-Samsat Jatim, Alfamidi, Alfamart, Link aja!, Indomart Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Metode pembayaran elektronik ini juga digunakan dalam penelitian sebelumnya, khususnya yang dilakukan oleh Yafie Setiawan di SAMSAT Mojokerto (Yafie, et.al, 2017). Namun demikian, kasus pembayaran online tidak dibahas secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya.

7. Menambah Layanan Pembayaran

Menambah layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor "Samsat Keliling" berlokasi di Halaman Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat dan Layanan Samsat Sore Payment Point Bumi Indah mulai pukul 15.00-18.00 WIB. Serta menambah layanan pembeyaran pajak dengan samsat keliling pada setiap hari minggu bertempat di pasar simo mulai pukul 06.00-10.00 WIB, dengan nama samsat "SEMANGGI" (semangat pelayanan bersinergi).



Gambar 1.4 Samsat Keliling Simo Gambar 1.5 Samsat Keliling Lidah Wetan

8. Melakukan Inovasi

Melalui sejumlah inovasi pelayanan, UPT PPD Surabaya Barat telah menunjukkan dedikasi yang kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penagihan piutang pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu prioritas utama. Selain mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya, teknologi yang telah dan sedang dikembangkan juga meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penagihan pajak kendaraan bermotor. Beberapa inovasi luar biasa yang telah dipraktekkan oleh UPT PPD Surabaya Barat adalah sebagai berikut:

a. SEMPOL (Semudah Itu Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor Online).

Sempol adalah aplikasi mobile atau alat berbasis web yang memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri dan instan menghitung perkiraan besaran pajak kendaraan bermotor mereka. Sempol (Semudah Itu Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor Online) menyederhanakan prosedur penghitungan pajak serta memangkas antrean di kantor Samsat, dan memudahkan persiapan pembayaran bagi wajib pajak.

b. OASIS (Opo Ae Syarat Ing Samsat)

OASIS adalah platform informasi yang meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan pajak, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan wajib pajak dengan memberikan informasi yang komprehensif mengenai peraturan dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.

c. Samsat Bank Sampah

Samsat Bank Sampah Menggabungkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan inisiatif pengendalian sampah. Botol plastik dan sampah daur ulang lainnya yang dikumpulkan dengan potongan pajak dapat ditukarkan oleh pembayar pajak. Sehingga Meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang nilai pengelolaan sampah dan menawarkan lebih banyak insentif untuk membayar pajak.

d. Mawatu (Mahameru Walk Thru)

Mawatu (Mahameru Walk Thru) adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus duduk, layanan ini adalah layanan alternatif apabila drive thru antriannya panjang melalui layanan walk thru sangat cepat dan mudah dengan cara berjalan langsung dari loket pendaftaran menuju kasir sehingga dapat meningkatkan produktivitas, dan memangkas waktu tunggu.

e. Samsat Dulur (Dugi Kelurahan)

Samsat Dulur (Dugi Kelurahan) merupakan layanan jemput bola dengan menerjunkan petugas Samsat ke masyarakat. Samsat Dulur (Dugi Kelurahan) melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana membantu wajib pajak yang berdomisili di lokasi yang jauh atau memiliki keterbatasan mobilitas, dan memperluas cakupan layanan, Samsat Dulur (Dugi Kelurahan) merupakan layanan jemput bola dengan menerjunkan petugas Samsat ke masyarakat.



Gambar 3.1 Samsat Dulur

9. Operasi Gabungan

Operasi gabungan wajib pajak merupakan Upaya strategis yang dilaksanakan secara kolaboratif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui kegiatan razia, edukasi dan penyediaan fasilitas pembayaran, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menunjang peningkatan pendapatan asli daerah, serta mewujudkan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan selamat.



Gambar 1.6 Pelaksanaan Operasi gabungan

Simpulan

Dapat di simpulkan bahwa dalam "Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dapat melakukan Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Surabaya Barat" menunjukkan bahwa upaya penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Barat sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PAD. Melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi kepada wajib pajak, pengawasan langsung, dan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran, UPT PPD Surabaya Barat berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Program-program unggulan seperti Samsat Drive Thru dan Payment Point juga berkontribusi signifikan dalam mempermudah akses pembayaran pajak bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak, terutama di kalangan UMKM, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran pajak. Dengan demikian, upaya penagihan yang terencana dan terorganisir tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran pajak yang tinggi di kalangan masyarakat, didukung oleh program edukasi dan kemudahan dalam proses pembayaran, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan PAD di Kota Surabaya Barat.

Saran

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: UPT PPD Surabaya Barat sebaiknya terus meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak menyadari pentingnya tepat waktu meembayar pajak. Penggunaan media sosial, seminar, dan workshop dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi ini.

Inovasi dalam Sistem Pembayaran: Mengembangkan lebih lanjut sistem pembayaran pajak yang lebih mudah dan efisien, seperti integrasi dengan aplikasi digital dan platform e-commerce, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mengurangi tunggakan.

Pendekatan Personal dalam Penagihan: Melakukan pendekatan yang lebih personal dalam penagihan pajak, seperti kunjungan langsung ke wajib pajak yang memiliki tunggakan. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara petugas pajak dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak.

Pemberian Insentif: Pertimbangkan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau melunasi tunggakan mereka. Insentif ini bisa berupa pengurangan denda atau diskon pajak, yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi kewajiban mereka.

Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penagihan pajak yang telah dilaksanakan. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Kerjasama dengan Instansi Terkait: Membangun kerjasama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan dinas perhubungan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Kerjasama ini dapat membantu dalam penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Daftar Pustaka

Aristi Tiara Vania, 2016 *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT. Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kota Samarinda Tahun 2016-2018*, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Anonim, *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12.*

Irfandy, Taufik Fajrin; Domai, Tjahjanulin; dan Hadi, Minto, (2016), "Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)". *Jurnal Administrasi Publik*, 1:201.

Mauliyah Ika Nur, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, & Luluk Nur Khotimah, (2023) *Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember*, Vol. 1, No. 1, *JURBISMAN: Jurnal Bisnis Manajemen*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Meyla Yosi Audi, Desi Puspita, & Devi Hardianti., (2024), *Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember*, Vol.2, No.2, *Jurnal Multi Disiplin Ilmu*, Univeritas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Mukhlis, Imam. (2012). *Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerba Swadaya Grup

Rofiah Siti, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, & Luluk Musfiroh (2024), *Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore*, Vol.2, No.2, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Univeritas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Setiawan, Yafie. (2017). *“Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)”*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Wijayanti, Sri. (2017). *“Peran Aparat Perpajakan Dalam Menjalankan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara”*. Skripsi. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.

